



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA
KOMISI VI DPR RI DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI – SESI I**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 46 (Empat puluh enam)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : Pukul 11.03 WIB s.d 12.44 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A.
(Wakil Ketua Komisi VI/F-P.Gerindra)
Acara : Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
41 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

- 9 dari 12 orang Anggota
1. Adisatrya Suryo Sulisto
 2. Rieke Diah Pitaloka
 3. ST. Ananta Wahana, S.H.
 4. Sonny T. Danaparamita
 5. I Nyoman Parta, S.H.
 6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Dr. Evita Nursanty., M.Sc.
 8. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 9. DR. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

- 6 dari 8 orang Anggota
1. M. Sarmuji., S.E., M.Si.

2. Ir. H. Mohamad Idris Laena
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
4. Trifena M. Tinal., B.Sc
5. Nusron Wahid
6. Budhy Setiawan

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

5 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal., M.B.A.
2. Supratman Andi Agtas., S.H., M.H.
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh., B.Bus., M.M., M.B.A.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

3 dari 6 orang Anggota

1. H. Rudi Hartono Bangun., S.E., M.A.P.
2. Zuristyo Firmadata., S.E., M.M.
3. H. Subardi., S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

4 dari 6 orang Anggota

1. Ir. H. M. Nasim Khan
2. Tommy Kurniawan
3. Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si.
4. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

5 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E Herman Khaeron., M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Putu Supadma Rudana
5. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom., M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4 dari 4 orang Anggota

1. Amin A.K., M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli
4. Mahfudz Abdurrahman, S. Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

5 dari 5 orang Anggota

1. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih



3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
4. Daeng Muhammad., S.E., M.Si.
5. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN

1. Menteri Perdagangan RI (Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.)
2. Sekjen Kemendag (Drs. Suhanto, M.M.)
3. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu RI (Syahda Guruh L. Samudera)
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Perundangan II Kemenkumham (Unan Pribadi, S.H., M.H.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Dan selamat datang kami ucapkan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, Pak Jerry *enggak* datang ya?

Baik, tentu Pak Menteri Perdagangan beserta jajarannya, Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, ada ya? Baik, selamat datang Bapak Syahda Guruh L. Samudera, dan dari Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan dan Perundang-Undangan II, Bapak Unan Pribadi, beserta jajarannya masing-masing.

Selamat datang kepada rapat kerja pada hari Selasa, 5 Juli 2022.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.



Mengingat kita masih dalam suasana mudah-mudahan akhir daripada pandemi Covid, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh AKD dan mitra kerja dilakukan baik secara fisik dan virtual, dengan ketentuan prokes yang masih berlaku.

Bapak/Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 23 orang dengan anggota yang izin 9 orang, dengan jumlah fraksi 9, sehingga kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim*, rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.03 WIB)


Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah adalah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang:

1. Pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional, (*Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*), dan
2. Pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

Presiden Republik Indonesia telah mengirim surat Presiden Nomor R13/PRES/04/2022 tanggal 4 April 2022 mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan selanjutnya untuk dibicarakan dalam sidang perwakilan, eh, sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat Presiden Nomor R16/PRES/04/2021 tanggal 12 April 2021 mengenai Rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea kepada DPR RI.

Adapun agenda sesi Raker kita pada hari ini adalah,

- Sesi pertama, pembukaan, keterangan ataupun penjelasan dari Pemerintah, pandangan umum dari fraksi-fraksi, tanggapan, dan jawaban dan pembahasan RUU DIM RUU dan DIM Penjelasan.
 - Sesi dua adalah pendapat akhir mini Fraksi-fraksi, pendapat akhir Pemerintah, pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan, penandatanganan naskah RUU dan penjelasan, dan
 - penutup.
- 

Baik, mari kita memulai dengan sesi pertama, kami persilakan kepada yang terhormat pemerintah diwakili oleh Menteri Perdagangan, untuk menyampaikan penjelasannya mengenai Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Waktu dan tempat, kami persilakan.

MENTERI PERDAGANGAN (ZULKIFLI HASAN):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya.

Ketua, Wakil Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,
Yang saya hormati yang mewakili Kumham dan juga Kemenlu, *makasih* sudah hadir,

Pertama-tama tentu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya *alhamdulillah* pagi ini kita bisa melangsungkan rapat dengan Anggota DPR yang terhormat, dalam rangka melakukan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Pengesahan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah mengundang kami.

Perkenalkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang yang dimaksud. Persetujuan ini diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2011, mulai dirundingkan pada tahun 2013, dan ditandatangani pada tanggal 15 November 2020, oleh 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra eksternalnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru.

Proses ratifikasi telah melalui dua kali raker dengan DPR RI, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 13 Desember 2021, yang memutuskan disahkan melalui undang-undang, nah kalau tidak undang-undang juga bisa juga melalui Perpres. Kegiatan *forum group discussion* dengan Komisi VI DPR RI juga telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021 dan 2 Juni 2022, ada *slide* itu.



Perkembangan ratifikasi dan implementasi. Persetujuan ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 oleh 10 negara anggotanya. Dan diikuti oleh Korea Selatan pada tanggal 1 Februari 2022, Malaysia 18 Maret 2022, Indonesia dan Filipin saat ini masih dalam proses ratifikasi. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara inisiator dan ketua perundingan, diharapkan dapat segera menyelesaikan proses pengesahan ini, serta dapat mengoptimalkan manfaat dan dari persetujuan ini yang bersifat modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan. Terdiri dari 20 bab, 17 lampiran teks perjanjian, 54 lampiran jadwal komitmen akses pasar, dengan total teks perjanjian sebanyak 14.411 halaman.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Sebagai mega FTA terbesar di dunia, persetujuan ini mengharmonisasikan sebagai komitmen dari persetujuan ASEAN + 1 FTA, penguatan rantai pasok di kawasan. Keunggulan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan ekonomi dan daya saing nasional.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian pemerintah, implementasinya dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, baik dari segi perdagangan barang, perdagangan jasa, tentu juga investasi. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, diantaranya upaya deregulasi dan mendorong investasi, menyusun rancangan rencana aksi nasional, sosialisasi edukasi publik, memaksimalkan peran perwakilan perdagangan Indonesia.

Rencana aksi implementasi peningkatan daya saing nasional. Untuk memastikan optimalisasi peningkatan daya saing nasional dalam implementasi persetujuan ini, pemerintah telah memiliki sejumlah strategi dan upaya mitigasi rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah secara paralel juga tengah mempersiapkan tiga rancangan peraturan tingkat menteri, untuk implementasi persetujuan RCEP ini, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan tentang Surat Keterangan Asal dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif, serta PMK tentang Tata cara Pengenaan Tarif sebagai aturan teknis untuk implementasi BAB Perdagangan Barang.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Terdapat beberapa alasan Indonesia perlu segera mengesahkan perjanjian ini,

- pertama, Indonesia-Korea CEPA menandai babak baru hubungan kerja sama kedua negara dan status kemitraan *special strategic partnership*,
- kedua, pengesahan IK-CEPA merupakan komitmen Pemerintah Indonesia di mana Republik Korea telah menyelesaikan proses ratifikasinya Juni 29, 2021,
- ketiga, Indonesia juga memiliki kepentingan atas sejumlah produk barang dan jasa, penanaman modal, serta area kerja sama ekonomi yang belum dikomitmenkan dalam ASEAN Korea FTA,



- keempat, IK-CEPA diharapkan juga sebagai pintu masuk Indonesia ke 15 mitra FTA Republik Korea.

Menanggapi beberapa pertanyaan seputar manfaat IK-CEPA ini bagi UMKM, dapat kami sampaikan bahwa Indonesia dan Republik Korea sepakat melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kebijakan terkait UMKM. Pemberian akses yang lebih luas ke pasar Republik Korea, serta peningkatan investasi arus teknologi, juga dipercaya akan meningkatkan peluang bagi UMKM Indonesia.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Secara politis, implementasi IK-CEPA semakin memperkuat hubungan bilateral. Dari segi hukum, ketentuan dalam IK-CEPA akan memberikan kepastian hukum dan keseragaman, aturan perdagangan bagi para pelaku usaha kedua negara. Bagi perekonomian Indonesia, akan memberikan beberapa manfaat, mulai dari peningkatan kinerja makro ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sampai peningkatan peran dan peluang UMKM dengan adanya kerja sama ekonomi dan transfer pengetahuan serta teknologi dari Republik Korea.

Dalam rangka mitigasi implementasi IK-CEPA, pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai langkah, diantaranya sosialisasi ke *stakeholder*, penguatan UMKM, peningkatan peran perwakilan perdagangan, serta penguatan pemahaman pelaku usaha terkait karakter, selera, budaya, bahasa, regulasi Republik Korea.

Dan dalam hal ini kami memohon dukungan Bapak/Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat untuk bersama-sama memastikan agar implementasi ini dapat berjalan lancar dan tentu bermanfaat luas.

Sejak DPR RI memutuskan pengesahan perjanjian ini melalui undang-undang pada tanggal 26 Januari 2022, kami bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses pengesahan perjanjian ini. Termasuk secara paralel menyiapkan peraturan turunan yang akan ditetapkan setelah perjanjian ini disahkan. Untuk pengesahan IK-CEPA, kami telah mendapatkan surat dukungan juga dari berbagai kementerian/lembaga terkait, dari sejumlah asosiasi pelaku usaha, kami akan senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pimpinan, Anggota Komisi VI yang terhormat,

Kami berharap rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan di, mendapat persetujuan bersama dari DPR RI, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Atas segala perhatian, kerja sama Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah *Subhanahu Wa*

Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi pengabdian, amal ibadah kita dalam melaksanakan tugas kenegaraan ini, Amiin, Amiin yaa *robbal alamin*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah, telah menyampaikan penjelasannya.

Selanjutnya kita akan masuk pemandangan umum fraksi-fraksi. Nah sebelum kita persilaka, iya dua-dua sekaligus. Nah saya karena kita begini, hari ini kita juga akan ada paripurna jam 1, jadi waktu kita agak terbatas, tapi saya juga tidak boleh memotong hak fraksi manapun untuk membacakan atau boleh menyerahkan atau diboleh dipersingkat bacanya, nah itu saya persilakan kepada fraksi masing-masing. Nah silakan, Pak.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya usul, saya usul.

KETUA RAPAT:

Nah silakan, Pak.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya usul *aja*, kalau anggota menyetujui, di pandangan umum, barang kali cukup persetujuan lalu diserahkan, nanti di pandangan mini fraksinya dibacakan masing-masing. Kan subtansinya kira-kira hampir sama lah, kira-kira itu, jadi yang pandangan umum setuju secara lisan masing-masing, lalu diserahkan ke Pimpinan, nanti yang pandangan mini fraksinya, persetujuan sebagai undang-undang dibacakan, boleh.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Dan memang kemarin sudah kita lakukan di rapat internal, kurang lebih persetujuan dari semua fraksi. Cuma di sini kan harus menyampaikan secara formil kepada Pak Menteri dan pemerintah. Jadi mungkin saya persilakan dulu kepada PDIP, diwakili Ibu Evita Nursanty.



F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Izinkan saya hanya membacakan beberapa hal yang saya anggap penting pada Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan. Adapun pandangan umum secara lengkap akan kami serahkan kepada Menteri Perdagangan.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Rakyat Republik Indonesia terhadap
Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive
Economic Partnership Agreement*

Disampaikan oleh Evita Nursanty Anggota A-181.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Merdeka!

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati saudara Menteri Perdagangan beserta jajaran,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan perlindungan-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI yang baru. Selamat Pak Menteri, atas penugasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru, tentunya kami berharap dengan menteri yang baru, kemitraan antara Komisi VI dan Kementerian Perdagangan akan semakin erat dan semakin baik ke depan.

Setelah mencermati Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, bersama ini izinkan Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RUU yang dimaksud. Ada 6 halaman Pak Menteri, saya *skip* saja.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
serta saudara Menteri Perdagangan yang kami hormati,

Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan siap untuk membahas dan mendalami RUU tentang Pengesahan RCEP dengan pemerintah, sekaligus mendorong penyelesaian pengesahan RUU ini sebelum DPR memasuki



masa reses berikutnya. Dengan harapan agar Indonesia bisa segera mengimplementasikan dan mengambil manfaat dari RCEP di semester II tahun 2022.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Merdeka!

Jakarta, 5 Juli 2022,
Pimpinan kelompok Fraksi Komisi VI
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua,
Adisatrya Suryo Sulisto A-196.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea
(*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*),

ini wajib dibacakan Pak Menteri.
Disampaikan oleh Evita Nursanty Nomor Anggota 181.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang saya hormati saudara Menteri Perdagangan beserta jajaran,

Setelah mencermati Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*), bersama ini izinkan saya, Fraksi PDI-Perjuangan Komisi VI DPR RI, untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RUU yang dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
serta saudara Menteri Perdagangan yang kami hormati,

Kami dari Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan siap untuk membahas dan mendalami RUU tentang Pengesahan IK-CEPA dengan pemerintah.



Sekaligus mendorong penyelesaian pengesahan RUU ini sebelum DPR RI memasuki masa reses berikutnya.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Merdeka!

Jakarta 5 Juli 2022,
Pimpinan kelompok Fraksi Komisi VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua,
Adisatrya Suryo Sulisto A-196.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Silakan diserahkan, Ibu.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP)

Baik terima kasih, kita melanjutkan dengan Fraksi Partai Golkar.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Regional

Dibacakan oleh Budhy Setiawan, Nomor Anggota A-290,
Daerah Pemilihan Jawa Barat III.

Yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat para Anggota dan hadirin yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Syalom, om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Sesuai dengan kesepakatan dari Pimpinan dan para Anggota, maka saya langsung kepada alinea terakhir.



Fraksi Partai Golkar menyatakan sepakat terhadap pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-undang *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua H. Kahar Muzakir dan Sekretaris Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum, keduanya ditandatangani.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Langsung kepada alinea terakhir, Fraksi Partai Golkar menyatakan sepakat terhadap pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Naskah ini ditandatangani oleh Ketua H. Kahar Muzakir dan Sekretaris Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Terima kasih waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan Pak Budhy untuk menyerahkan.

**(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
GOLKAR)**

Baik, terima kasih kami ucapkan ke Fraksi Partai Golkar.
Dan sekarang kami persilakan Fraksi Partai Gerindra.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M.,
MBA.):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

Dibacakan oleh Muhammad Husein Fadlulloh,
Anggota Nomor A-94, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syalom om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam Indonesia Raya.



Terima kasih.

Sesuai dengan arahan Pimpinan, Fraksi Partai Gerindra telah mempelajari dengan seksama Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Izinkan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Gerindra sebagai berikut yang di mana ada 5 poin, namun kita langsung kepada alinea terakhir.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra setuju Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* agar dibahas lebih lanjut ke tingkat berikutnya.

Kami Fraksi Partai Gerindra, berharap perjanjian RCEP ini diharapkan mampu mendatangkan keberhasilan dalam implementasinya, sehingga integrasi ekonomi ASEAN dapat terwujud. Perjanjian ini juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatnya ekspor Indonesia ke negara-negara Anggota RCEP.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan Salam Indonesia Raya.

Ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Gerindra,
Wakil Ketua Dr. Habibuokhman, S.H., M.H.,
dan juga Wakil Sekretaris Bambang Haryadi, S.E.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Iya karena ini menteri baru, jadi Gerindra yang baca orang dua.

Salam hormat buat Menteri baru ini,

Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Mini Fraksi Gerindra DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang

KETUA RAPAT:

Pak Khilmi yang Pemandangan Umumnya dulu Pak, Pemandangan Umum, yang Pandangan Umumnya dulu.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Iya, jadi,

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap



Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea

Dibacakan oleh Khilmi, Anggota Nomor A-115,
Daerah Pemilihan Jawa Timur X.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Indonesia Raya.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Saudara Menteri Perdagangan RI,
Menteri Luar Negeri RI, dan
Menteri Hukum dan HAM RI,
selaku wakil pemerintah seluruh hadirin yang berbahagia,

Di hari yang penting ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai di hari yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kita sebagai diamanahkan, amanahkan oleh konstitusi. Jadi kita bacakan persetujuannya ini, Pak.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Para Menteri wakil pemerintah serta seluruh hadirin yang berbahagia,

Demikian persetujuan catatan yang perlu diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya Fraksi Gerindra setuju Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea IK-CEPA, agar dibahas lebih lanjut ke tingkat berikutnya.

Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Indonesia Raya.

Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Wakil Ketua Dr. Habiburokhman, S.H., M.H, Nomor Anggota A-77,
Wakil Sekretaris Bambang Haryadi, S.E, Nomor Anggota A-109.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Kami persilakan untuk diserahkan. Mau satu-satu, berdua langsung berdua. Ini inklusif.

**(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
GERINDRA)**



Baik, terima kasih kami ucapkan ke Fraksi Gerindra.
Dan kita lanjut dengan Fraksi Nasdem, Pak Rudi.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Makasih, Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI
terhadap Rancangan Undang-Undang Pengesahan *Regional Comprehensive
Economic Partnership Agreement*

Anggota Komisi VI Fraksi Partai Nasdem DPR RI,
Rudi Hartono Bangun, Nomor Anggota A-353.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syalom.

Salam sejahtera.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam restrorasi.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Luar Negeri RI beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta perkenan-Nya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dalam agenda menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili Fraksi Nasdem, untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RUU Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Patnership*. Selanjutnya saya alihkan ke halaman akhir.

Hadirin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang berbahagia,

Semangat kemajuan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran rakyat adalah cita-cita pendiri di negeri ini. Kami Fraksi Nasdem, melihat jalan untuk mewujudkan hal tersebut melalui kerja sama RCEP ini. Namun azas kehati-hatian atas konsekuensi dari kesepakatan tersebut harus tetap dikedepankan, terutama untuk kepentingan masa depan yang dalam hal



ini adalah generasi penerus Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Kembali lagi dan tidak henti-hentinya mengingatkan, agar kita harus memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi penerus bangsa. Kesepakatan RCEP harus menjamin itu. Dan dibutuhkan kepastian itu. Sehingga kita akan dengan bangga meninggalkan warisan bagi mereka dan tercatat dalam sejarah, sebagai bagian yang berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsa ini.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami Fraksi Nasdem DPR RI, menyetujui Rancangan RUU Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk dibahas lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan berkah dan tercatat sebagai nilai ibadah untuk apapun hasil yang kita sepakati bersama nantinya.

Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pandangan umum ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Syalom.
Salam sejahtera.
Om santi-santi.
Salam kebajikan.

Jakarta,
Pimpinan Fraksi Nasdem DPR RI,
Ketua Roberth Rouw,
Sekretaris, Saan Mustopa, ditandatangani.

Berikut Pak Pimpinan dan Menteri,

Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan RUU Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Korea.

Anggota Komisi VI Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun, Nomor 353.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri Perdagangan,
Menteri Luar Negeri dan jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya, serta
Hadirin yang berbahagia,



Saya langsung beralih ke halaman akhir.

Dengan berbagai pertimbangan hal tersebut, kami dari Fraksi Nasdem DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea untuk dibahas lebih lanjut dalam Pembicaraan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi Nasdem.
Kita lanjut dengan Fraksi PKB.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelum kami membacakan pandangan fraksi, kami ucapkan *ahlan wa sahan* kepada Pak Menteri di Komisi VI, semoga sinergisitas kita ke depan lebih baik dan bermanfaat buat bangsa, negara, dan rakyat kita semuanya.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang *Regional Comprehensive Economic Partnership*, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

Disampaikan oleh juru bicara Kapoksi F-PKB DPR RI,
Ir. H. Muhammad Nasim Khan, Anggota Nomor A-36.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan sidang,
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI yang kami banggakan,
Yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang kita harapkan menjadi kebanggaan, serta
Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat dan karunia-Nya



sehingga kita dapat hadir melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Sholawat serta salam kita tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah *Sallallahu alaihi wa salam*, yang telah memberikan ilmu dan contoh dalam mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kita menjadikan teladan dan bekerja demi terwujudnya peradaban Indonesia *baldatun thayyiban wa rabbun ghafur*.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-undang. Mengawali penyampaian, saya kira sudah terlampir akan disampaikan, dan juga kami, namun kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan beberapa catatan sebagai berikut:

- yang pertama, mengacu pada isi perjanjian RCEP diyakin memiliki komitmen untuk memudahkan perdagangan barang dan jasa termasuk tentang biaya tarif biaya masuk yang akan dipangkas, itu menjadi catatan pertama.
- catatan kedua, dalam hal penanaman modal perlu sekali pemerintah jeli melihat adanya kebutuhan yang mengikat dari para investor berinvestasi di Indonesia dan terlampir.
- yang ketiga, salah satu poin penting yang juga perlu diperhatikan adalah soal ketenagakerjaan kita, dari 64 negara di survei, Indonesia masih berada di urutan yang ke-37 dan terlampir,
- yang keempat, kendati Rancangan Undang-Undang RCEP memiliki ketentuan adanya agenda UMKM, tetapi langkah yang mesti diperhatikan pemerintah adalah bagaimana untuk terus memperdayakan UMKM berikutnya.

Saudara Pimpinan sidang, Anggota Dewan, Menteri Perdagangan, serta hadirin yang terhormat,

Demikian pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Selanjutnya setelah mengikuti dan mempertimbangkan seluruh proses yang berlangsung maka Fraksi PKB dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahimm, Allahumma Shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad*, menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ini dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian saudara Pimpinan dan para Anggota, maka Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan petunjuk-Nya untuk kita semua.



Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,
H. Cucun Syamsurijal dan Drs. Fathan sebagai Sekretaris.

Sesi kedua, kami sampaikan,

Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pengesahan
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

Disampaikan oleh juru bicara Kapoksi F-PKB DPR RI,
Ir. H. Muhammad Nasim Khan, Anggota Nomor A-36.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Pimpinan sidang,
Saudara Anggota Dewan yang kami banggakan,
Yang terhormat saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang
menjadikan harapan kebanggaan kita, serta
Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah
Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir
melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan
dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi
terhadap pembahasan rancangan undang-undang berikut.

Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmu dan contoh dalam
mengelola, mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kita patut
meneladani beliau demi terwujudnya peradaban Indonesia yang *baldatun
thayyiban wa rabbun ghafur*.

Saudara Pimpinan sidang, Anggota Dewan, Menteri Perdagangan, serta
hadirin yang terhormat,

Dalam perjanjian kemitraan, sudah terlampir beberapa hal yang sudah
disampaikan sebelumnya dan tercatat. Beberapa hal yang menjadi catatan
Fraksi PKB diantaranya:

- yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sasaran ekspor harus pada basis komoditas-komoditas dengan nilai tambah yang tinggi, karena hal itulah yang dapat mendongkrak neraca perdagangan Indonesia yang sebelumnya sudah terjadi sangat baik,



- yang kedua, biaya logistik di Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan negara lain termasuk Korea Selatan. Biaya logistik di Indonesia di tahun 2021 sebesar 23% dari produk domestik bruto PDB, sementara Korea Selatan sekitar 9% dan terlampir,
- yang ketiga, melalui IK-CEPA, Indonesia dan Republik Korea berkomitmen untuk membuka lebih dari 100 akses pasar subsektor jasa, di mana Indonesia membuka 106 subsektor jasa pada 12 sektor jasa. Perlu memantau dari hasil perjanjian ini agar dampak dapat membawa peningkatan terhadap ekonomi Indonesia,
- yang keempat, dalam perjanjian IK-CEPA, Indonesia berkomitmen eliminasi tarif dalam IK-CEPA sebesar 92,06% setara dengan 9.954 pos tarif dan terdapat bisa menjadi komitmen terbaik ke depan.

Akhirnya Fraksi PKB mengingatkan bahwa persetujuan IK-CEPA ini haruslah membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita, sehingga produk-produk dari Indonesia dapat menambah pasar yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi meningkat secara signifikan.

Saudara Pimpinan sidang, Anggota Dewan, Menteri Perdagangan, serta hadirin yang terhormat,

Demikianlah pandangan kami terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Selanjutnya setelah mengikuti dan mempertimbangkan seluruh proses yang berlangsung, maka Fraksi PKB dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim, Allahumma Shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad*, menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, IK-CEPA ini, dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, Saudara Pimpinan dan para Anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan keridhoan-Nya, Aamiin.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
H. Cucun Syamsurijal dan Drs. Fathan,
Jakarta 5 Juli 2022.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB)



KETUA RAPAT:

Baik terima kasih kami ucapkan ke Fraksi PKB.
Sekarang kita lanjut ke Fraksi Partai Demokrat, Ibu, silakan

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rencana Pengesahan RUU Tentang *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Disampaikan oleh Melani Leimena Suharli, Nomor Anggota A-536.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI beserta jajaran,
Menteri Perdagangan RI beserta jajaran,
Menteri Luar Negeri RI beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, juga
Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap dapat melaksanakan tugas dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR RI hari ini, beragendakan rencana pengesahan terhadap kerja sama ekonomi internasional yang akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yakni *Regional Comprehensive Economic Partnership*.

Pada dasarnya kerja sama ekonomi internasional adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam konstalasi hubungan internasional. Setiap bentuk kerja sama ekonomi regional di kawasan adalah bukti bahwa dunia sedang terus bergerak menuju pembangunan ekonomi yang semakin terintegrasi, inklusif dan kompetitif, sehingga tujuan untuk membawa pertumbuhan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat di kawasan, dapat tercapai. Oleh karena itu terkait dengan rencana ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership*, kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat, di sini ada lima butir, mungkin tidak saya bacakan satu-persatu, langsung saja di terakhirnya.



Berdasarkan catatan tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas rencana ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* dengan seksama dan komprehensif. Namun demikian, harus dipastikan bahwa dengan pengesahan tersebut tidak mengganggu kedaulatan dan urusan domestik masing-masing negara, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pendapat umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
ditandatangani,
Ketua, Dr. Edhy Baskoro Yudhoyono, M. SC, Nomor Anggota A-554
dan Sekretaris, H. Marwan Cik Hasan, M.M, Nomor Anggota A-535.

Pandangan Fraksi yang kedua.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rencana Pengesahan RUU Tentang Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership*

Disampaikan oleh Melani Leimena Suharli, Nomor Anggota A-536.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.
Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI beserta jajaran,
Menteri Perdagangan RI beserta jajaran,
Menteri Luar Negeri RI beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, juga
Rekan-rekan media, dan
Hadirin yang kami hormati,

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap dapat melaksanakan tugas dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR RI. Dalam rapat kerja ini, izinkan kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rencana Pengesahan RUU Tentang Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership*.



Seperti yang kita ketahui, Korea merupakan mitra perdagangan yang cukup penting bagi Indonesia. Kerja sama Indonesia-Korea diharapkan mampu meningkatkan neraca perdagangan kedua belah pihak. Indonesia harus lebih unggul dalam ratifikasi tersebut, bukan sebaliknya. Kita juga mendorong agar pelibataan perdagangan untuk pengusaha merah putih atau lokal konten atau UMKM salah satunya, selain keunggulan dagang, negara kita secara keseluruhan dengan mengedepankan *unique, uniqueness value, quality*, dan *delivery time* yang terbaik. Bentuk hubungan ekonomi yang sudah terjalin diharapkan terus mengalami peningkatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Kami, Fraksi Partai Demokrat, meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang senantiasa menjaga hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain, mengedepankan pendekatan yang bersifat *million friends and zero enemy*.

Terkait RUU tentang Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership* Kami dari Partai, kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa, ada lima poin, saya tidak bacakan, saya akan yang terakhir saja.

Berdasarkan catatan tersebut di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas rencana ratifikasi RUU tentang Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership* dengan seksama dan komprehensif. Namun demikian, harus dipastikan bahwa dengan pengesahan tersebut tidak mengganggu kedaulatan dan urusan domestik masing-masing negara.

Demikian pendapat umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

*Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 5 Juli 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani
Ketua, Dr. Edhy Baskoro Yudhoyono, M. SC, Nomor Anggota A-554
Sekretaris, H. Marwan Cik Hasan, M.M, Nomor Anggota A-535.

Terima kasih, Pimpinan.

**(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
DEMOKRAT)**

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi Partai Demokrat.



Dan kita melanjutkan ke Fraksi PKS.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Saudara Menteri Perdagangan dengan semua jajaran yang saya hormati,
Dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk pemandangan umum maupun pendapat akhir mini, dibacakan oleh dua orang, saya dan Bu Nevi. Di pemandangan umum ini Fraksi PKS memberikan catatan-catatan, dan nanti untuk persetujuan kita berikan dipendapat mini, begitu.

Nah izinkan saya menyampaikan dalam waktu kurang lebih dua menit, memberikan catatan-catatan terkait dengan Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan sholawat kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*, teladan kita semua, saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait pengesahan Persetujuan Kemitraan *Economic Comprehensive Regional*.

- Yang pertama Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan *Economic Comprehensive Regional* harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, sehingga bisa menghasilkan *surplus* neraca perdagangan Indonesia yang sehat,
- Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan *Economic Comprehensive Regional* harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana amanat Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (3).
- Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional harus dapat melindungi tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing yang masuk, mengingat di Bab 9 Ratifikasi RCEP diatur mengenai perpindahan orang perseorangan yang dapat menjadi pintu masuk tenaga kerja asing, sehingga dapat mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.
- Keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional menuntut peran Pemerintah untuk segera mempercepat pelaksanaan digitalisasi, baik bagi industri dalam negeri khususnya UMKM agar mereka tidak tergerus akibat adanya berbagai program ratifikasi perdagangan internasional,



- Kelima, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan ekonomi komprehensif regional menuntut segera diselesaikannya RUU Perlindungan Data Pribadi, dengan diaturnya ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam ratifikasi RCEP akan semakin banyak pihak yang menggunakan *e-commerce*, sehingga semakin banyak pula data pribadi yang tersebar di dunia digital.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan sebagai iktiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bekerja maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan Komisi VI, Anggota Komisi VI, Menteri Perdagangan dengan semua jajaran, dan seluruh hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Ketua, Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A A-449,
Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa, S.Si, M. Psi, Anggota A-427, ditandatangani.

Demikian Pimpinan, nanti kami serahkan bersama Bu Nevi, yang satu lagi. Silakan Bu Nevi untuk pandangan umum berikutnya.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea atau IK-CEPA, disampaikan oleh Nevi Zurainina Nomor Anggota A-416.

Bismillahirrahmanirahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Luar Negeri diwakili Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi,
Menteri Hukum dan HAM diwakili Direktur Harmonisasi Perundang-Undangan,
Rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sampai saat ini kita masih hadir di tempat ini dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah *Sallallahu alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat keadilan yang harus kita tegakkan demi membangun masyarakat sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI
Menteri Perdagangan, serta
Hadirin yang kami muliakan,

Seperti yang disampaikan tadi bahwa kami terkait dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- Yang pertama, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia,
- Kedua, Fraksi PKS berpendapat dengan adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan, "Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, percepat, dan melindungi industri tertentu dalam negeri dan atau untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan",
- Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan barang tidak serta-merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya pada produk makanan dan minuman, baik kemasan maupun olahan.

Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI DPR RI,
dan Menteri Perdagangan,
serta hadirin yang kami hormati,

Demikianlah pandangan umum kami sampaikan. Kami dari Fraksi PKS siap untuk membahas draft RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (IK-CEPA), sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI, dan Menteri Perdagangan, serta hadirin, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Jakarta, 5 Juli 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Ketua Dr. H. Juazuli Juwaini, M.A, A-449,
Sekretaris Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M. Psi. T., A-427, ditandatangani.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan diserahkan.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS)

Baik, terima kasih kepada Fraksi PKS.
Kita lanjutkan dengan Fraksi PAN.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Dari Fraksi PAN, untuk Pandangan Umum RCEP akan disampaikan oleh saya dan untuk IK-CEPA akan disampaikan oleh Bu Intan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

Dibacakan oleh Abdul Hakim Bafagih
Nomor Anggota A-506, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM,
beserta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri,

Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kita masih selalu diberi kekuatan,
kesehatan, dan kesempatan, untuk menjalankan tugas konstitusional kita
dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi tentang Pengesahan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP pada
hari yang berbahagia ini.



Sesuai dengan masukan dan arahan Pimpinan, beserta yang telah disepakati oleh teman-teman, kami akan langsung menuju kepada paragraf akhir. Adapun beberapa catatan penting akan kami sampaikan dalam pandangan mini akhir fraksi, Pak Menteri, langsung ke paragraf terakhir.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, yang akan kami lampirkan, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli,

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dr. Saleh Partaonan Daulay. M.Ag., M.Hum., M.A - selaku Ketua Fraksi,

Eko Hendro Purnomo, S.sos - selaku Sekretaris Fraksi.

Terima kasih.

Selanjutnya IK-CEPA akan dibacakan oleh Bu Intan, Pimpinan.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Saudaraku Hakim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,

Yang terhormat Pak Menteri Perdagangan beserta seluruh jajaran,

Mewakili Kementerian Kumham,

Mewakili Kementerian Luar Negeri,

Bersama Kapoksi, Saudaraku Jon Erizal, Saudaraku Hakim, Saudaraku Muhammad Daeng, Saudaraku Eko, izin, tapi mengikuti *online*.

Izinkan saya, Intan Fauzi Nomor Anggota A-499, membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).



Saya langsung kepada Pandangan Umum Partai Amanat Nasional, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.

*Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi.*

Jakarta, 5 Juli 2022
Pimpinan Fraksi PAN DPR RI
Dr. Saleh Daulay - Ketua, Eko Hendro Purnomo - Sekretaris.

Terima kasih.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kepada Fraksi PAN.
Dan yang terakhir, Fraksi PPP.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia
Dan Pemerintah Republik Korea,

Disampaikan pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri
Perdagangan RI pada Selasa, 5 Juli 2022 dengan juru bicara Fraksi PPP
DPR RI, Elly Rachmat Yasin dengan Nomor Anggota A-463.

*Bismillahiramanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI, juga
Yang terhormat Menteri Perdagangan RI, juga
Yang mewakili Menteri Luar Negeri dan Menkumham,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.



Puji dan syukur marilah kita panjatkan Kehadirat *Ilahi Robbi*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Selanjutnya saya akan membacakan di alinea terakhir.

Berdasarkan penjelasan dan uraian kami di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju agar Rencana Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, untuk pada tahapan berikutnya dengan tetap meminta waktu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, hingga pengambilan keputusan tingkat I. Demikian pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-undang ini disampaikan.

Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan RI beserta jajaran, rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR RI.

Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretaris Dr. H. Achmad Baidowi. S.Sos., M.Si.

Selanjutnya satu lagi,

Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Disampaikan pada Rapat kerja Komisi VI DPR RI Selasa, 5 Juli 2022
oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Elly Rachmat Yasin,
Anggota DPR RI Nomor A-463.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat saudara Pimpinan rapat,
Yang terhormat saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta
jajarannya,
Yang mewakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Menkumham.



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat *Illahi Robbi*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada saat ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengesahan RCEP. Saya juga langsung kepada alinea terakhir.

Persetujuan RCEP adalah untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang moderen, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan, yang dapat berkontribusi pada ekspansi perdagangan dan investasi regional, serta pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global dengan memperhatikan tingkat pembangunan masing-masing anggotanya, khususnya bagi negara yang kurang berkembang.

Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju agar Rancangan Undang-Undang RCEP untuk melakukan pendalaman lebih lanjut hingga pengambilan keputusan di tingkat I.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan akhirnya kepada Saudara Pimpinan rapat, Saudara Menteri Perdagangan, rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Juli 2022

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretaris Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M. Si.

(PENYERAHAN NASKAH PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Setelah kami mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan bahwa fraksi-fraksi di Komisi VI menyetujui untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Selanjutnya kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum.

Silakan.



MENTERI PERDAGANGAN (ZULKIFLI HASAN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Alhamdulillah, kami sungguh mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Kami tentu mencatat semua tadi, karena fraksi masing-masing ada catatan-catatan, ada yang dibaca, ada yang tidak, tetapi semua dokumen di sini akan menjadi catatan kami dalam pelaksanaannya. Persetujuan *Regional Comprehensive Agreement Partnership* dan IK-CEPA ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan ekonomi nasional, peningkatan daya saing, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperdalam kerja sama antar para pihak yang bergabung.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Saya juga baru kembali mengikuti penandatanganan *Comprehensive Partnership* antara Indonesia dan UAE, di mana perjanjian itu dilaksanakan, dikerjakan cepat, 9 bulan. Saya meyakini, semakin-yakinnya, bahwa perjanjian-perjanjian ini akan menguntungkan kita, ya, karena akan sangat membantu mempermudah ekspor barang-barang kita ke negara-negara yang kita membuat perjanjian ini. Sementara di tempat kita, produk-produk mereka itu sudah lama Pak, di Indonesia ini kan apa saja ada, apakah kita lihat dimana pun, produk-produk dari negara itu, ada di tempat kita, bahkan selama ini saya lihat mudah masuk ke tempat kita. Tapi sebaliknya, produk-produk kita sulit tembus ke pasar-pasar mereka. Saya kemarin di UAE itu bisa melihat salak, salak, Ibu Melani, ada rendang itu, nanas, pisang, itu *enggak* mudah, *gitu*.

Oleh karena itu, dengan perjanjian ini, termasuk yang baru kami selesaikan antara Indonesia dengan UAE itu, maka kalau dulu kita punya *hub* Singapura-Hongkong maka nanti perjanjian dengan UAE itu kita akan punya *hub* yang baru, yaitu UAE itu. Sehingga akses pasar kita ke Timur Tengah menjadi mudah, karena hampir semua perjanjian itu, produk kita, nanti *zero tax*-nya, ya Pak ya. Jadi kita ke ekspor ke Dubai itu, apakah produk pertanian, UMKM kita itu dengan 0 pajak, tarifnya 0. Dan Dubai, UAE itu akan menjadi *hub* untuk ke Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, Afrika, bahkan ke Amerika Latin. Memang kita punya pasar tradisional Eropa sulit sekarang, cerewet lagi begitu, banyak catatan. Tetapi negara-negara yang daya belinya



baru tumbuh, seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, itu luar biasa, *gitu*.

Oleh karena itu saya berharap betul, perjanjian-perjanjian ratifikasi ini lebih cepat kita tanda tangani, akan sangat menguntungkan kita, sekali lagi akan sangat menguntungkan kita.

Saya saksikan, dulu di Timur Tengah itu hampir semua produk-produk Tiongkok itu. Nah sekarang kita akan mulai. Nah tentu dengan 0% itu, pajak itu, saya kira UMKM kita, kemudian produk-produk pertanian kita, industri kita, itu akan lebih mudah. Di sana sekarang mudah sekali pakaian-pakaian dari Sukabumi, dari Bandung, baju muslim, saya lihat di tempat kita misalnya kalau kita makan pesen mie, mie Vietnam begitu, cuma mie aja kan Pak? Biasa *gitu*. Kalau kita ini kan punya rendang, punya nasi goreng, punya sate, banyak sekali. Hanya memang mungkin usaha pengusaha kecil kita belum terlatih, kemudian akses pasar luar yang sulit, nah dengan perjanjian ini kita menjadi mudah, *gitu*. Oleh karena itu saya sekali lagi terima kasih, dan saya yakin, seyakini-yakinnya ini untuk kebaikan kita.

Sekali lagi Pak Ketua, Pimpinan, dan Anggota DPR Komisi VI yang terhormat, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan kita untuk kebaikan merah putih.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, kita langsung melanjutkan pembahasan DIM yang saya bacakan, kita mulai dengan Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Sudah pada punya semuanya?

Baik, saya bacakan usulan dan kemudian saya mintakan persetujuan, baik kepada kami dan kepada pemerintah, terhadap masing-masing poin DIM ya. Nomor satu naskah RUU, Rancangan Undang-undang, sudah ditayangkan? Oke.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor dan tahun nanti disesuaikan,
tentang
Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership
Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia.

Setuju, Pemerintah setuju? Baik.



(RAPAT: SETUJU)

2. Menimbang:

- a) Bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. b) Bahwa untuk mendukung program pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya, serta Pemerintah Negara Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru telah menandatangani *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) pada tanggal 15 November 2020 dan untuk Pemerintah Indonesia, penandatanganan, penandatanganannya dilaksanakan di Bogor, Indonesia.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. c) Bahwa untuk melaksanakan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), perlu mengesahkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Setuju? Pemerintah, setuju?



(RAPAT: SETUJU)

6. Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

7. 2. Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

8. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

9. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

10. Memutuskan, menetapkan Undang-undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

11. Pasal 1
(1) Mengesahkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*, (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), yang telah ditandatangani oleh Presiden, Pemerintah Repub, Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 November 2020 di Bogor, Indonesia.



Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

12. (2) Salinan naskah asli *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

13. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

14. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

15. Disahkan di Jakarta pada tanggal....
Presiden Republik Indonesia

JOKO WIDODO

Setuju lah.

(RAPAT: SETUJU)

16. Diundangkan di Jakarta pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
YASONA H. LAOLY

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun dan nomor disesuaikan.

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Izin, Pimpinan.



KETUA RAPAT:

Iya.

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Untuk pengundangan, karena setelah ada perubahan Undang-undang 12 ya, di Undang-undang 13 Tahun 2022, pengundangnya sekarang di Kementerian Sekretariat Negara, Pak Mensetneg, jadi nanti di

KETUA RAPAT:

Oh begitu, jadi bagaimana?

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Iya ini karena waktu itu proses harmonisasinya masih masih belum dirubah ya Undang-undang 12-nya, nah sekarang sudah berubah. Jadi di situ

KETUA RAPAT:

Sudah disahkan?

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Menteri Sekretariat Negara.

KETUA RAPAT:

Jadi coba di *edit* langsung lah.

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Iya, revisi undang-undang. Menteri Sekretaris Negara.

KETUA RAPAT:

Iya di *edit*, Menteri Sekretariat Negara, itu Menteri Sekretaris apa Menteri Sekretariat Negara?

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Menteri Sekretaris Negara.

KETUA RAPAT:

Sekretaris, oke diganti. Coba nama lengkapnya.

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Namanya saya lihat di

KETUA RAPAT:

Kurang paham ya.

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Yang sudah diundangkan sebentar, Pak Pimpinan. Pratikno, Bapak Pimpinan, tidak pakai gelar Pratikno saja, tanpa gelar.

KETUA RAPAT:

Pratikno *aja* begitu?

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Iya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, dapat kami setujui?

**DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):**

Sudah.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)



Baik, terima kasih.

Kita lanjut ke DIM Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tahun titik-titik. *Alhamdulillah*. Baik, Pasal 1 terhadap, ini ditayangin dong. Iya, ini *udah* mulai. Oke, saya ditawarkan dipersingkat oleh teman-teman, syukur *alhamdulillah*.

Jadi untuk DIM nomor 1 tentang penjelasan apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 3?

(RAPAT: SETUJU)

Luar biasa ya, Nomor 4?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 5?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 6?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 7?

(RAPAT: SETUJU)

Dan Nomor 8?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, sudah selesai DIM dan penjelasan terhadap RUU RCEP.

Sekarang kita melanjutkan dengan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Oke kita melanjutkan dengan pola yang sama

Nomor 1-nya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 3? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 4? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 5? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 6? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 7?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 8?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 9?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 10?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 11?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 12?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 13?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 14?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 15?

(RAPAT: SETUJU)



Nomor 16?

(RAPAT:SETUJU)

Dan nomor 17 diperbaiki. Baik, Nomor 17, *enggak*, Menteri Sekretaris Negara, yang tadi juga Menteri Sekretaris Negara, sudah? Oke?

17 bisa kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut ke penjelasan, nomor 1, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 3? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 4? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 5? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 6? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 7? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 8? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 9? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)



Nomor 10? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, sudah selesai sesi satu daripada rapat ini, jadi ini harus kita ketok palu dulu *nih*.

(RAPAT SESI I SELESAI PADA PUKUL 12.44 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

